

Nomor SOP	Hik. 07.01/001/SETWATM/2024
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2021
Tanggal Revisi	1 Juni 2024
Tanggal Efektif	Tahun 2024
Disahkan Oleh	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
Nama SOP	PENGELOLAAN JDIH



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
Sekretaris



Drs. HERI GUSTARI, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP : 19680817 199301 1 001

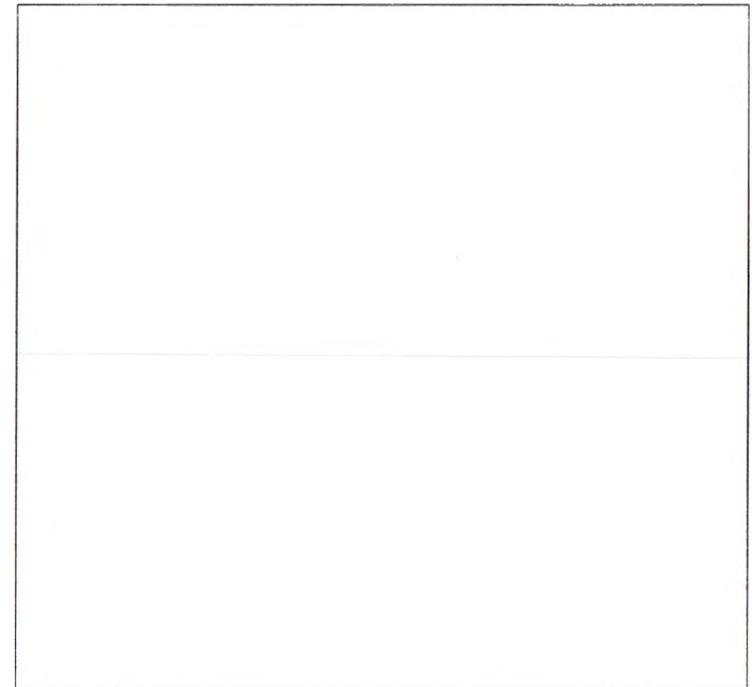
Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024. Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Kualifikasi Pelaksana

S2;
S1;
D3.

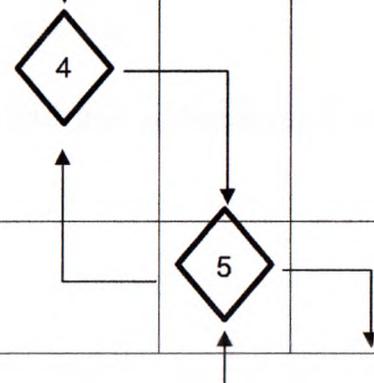
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Pangandaran yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Daerah kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah;
13. Peraturar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi. Uraian Tugas Dan Tata kerja Sekretariat Dewan Penwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.



Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Fasilitasi penyusunan naskah akademik. 2. SOP Fasilitasi penyusunan peraturan DPRD. 3. SOP Fasilitasi Rapat-Rapat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang terkait 2. Komputer 3. ATK 4. Jadwal Penyusunan 5. Risalah rapat 6. Dokumentasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa adanya SOP dapat mengakibatkan ketidapastian tugas dalam pengelolaan JDIH 2. Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan TUPOKSI akibat dari ketidakpastian tugas dalam fasilitasi kepada DPRD Kabupaten Pangandaran dan masyarakat. 	

**LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN PRODUK HUKUM DAERAH
(PERATURAN DAERAH) MELALUI JDIH**

TAHAPAN	PENDAMPING BAPEM PERDA, KOMISI, FRAKSI, PANSUS	PENGELOLA ADM JDIH / OPERATOR JDIH	PERANCA NG PUU AHLI MUDA	KABAG Persid PUU	SEKWAN	MUTU BAKU			KETERANGAN
						PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
Perancang PUU Ahli Muda menerima Risalah hasil Pembahasan Raperda/NA/Produk Hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran	1					Risalah Rapat berikut dokumentasi visual/foto/video	1 Hari	Risalah Rapat	
Perancang PUU Ahli Muda membuat konsep bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/Produk Hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran			2				1 Hari	Konsep naskah bahan unggah lengkap dengan foto	Foto-foto (dokumentasi) dipilih mana yang dapat diunggah dan tidak
Konsep bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/Produk Hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran disampaikan ke Pengelola JDIH untuk diketik		3					1 Hari	Naskah bahan unggah lengkap dengan foto	
Bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/Produk Hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran disampaikan ke Perancang PUU Ahli Muda untuk dikoreksi			4				1 Hari	Naskah bahan unggah lengkap dengan foto	Naskah hasil koreksi naik ke Kabag atau kembali diperbaiki (jika ada yang salah)
Bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/Produk Hukum lainnya yang dibahas oleh				5			2 Jam	Naskah bahan unggah lengkap	Naskah hasil koreksi naik ke Sekwan atau kembali



DPRD Kab. Pangandaran disampaikan ke Kabag Persid PUU untuk dikoreksi								dengan foto	diperbaiki (jika ada yang salah)
Bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/Produk Hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran disampaikan ke Sekwan untuk dikoreksi								2 Jam	Naskah bahan unggah lengkap dengan foto Naskah hasil koreksi disetujui untuk diunggah atau diperbaiki (jika ada yang salah)
Bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/Produk Hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran hasil koreksi Sekwan disampaikan ke Perancang PUU Ahli Muda melalui Kabag Persid PUU								1 Hari	Dokumen Peraturan atau Risalah lainnya yang disetujui untuk diunggah
Bahan unggah hasil koreksi Sekwan diteruskan kepada operator untuk diunggah ke JDIH								1 Hari	Naskah dipublikasi melalui JDIH

Parigi, 1 Juni 2024

Sekretaris DPRD

Kabupaten Pangandaran



DIS. HERI GUSTARI. M.Si.
 Pembina Utama Madya (IV/c)
 NIP : 19680817 199301 1 001